

## ABSTRAK

Badan Pertanahan Nasional senantiasa berupaya untuk membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya meliputi pendaftaran tanah secara konseptual dan terpadu. Kabupaten Pematang sebagai salah satu peserta PTSL karena animo masyarakat yang kurang, tingkat pendidikan rendah, sehingga memerlukan bantuan untuk dapat melegalkan status hak atas tanah yang melekat di atasnya yaitu melalui sertifikasi tanah secara massal sesuai dengan asas pendaftaran tanah.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prosedur persertifikatan massal atas tanah negara serta faktor pendukung dan penghambat yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Pematang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian di lapangan, dimulai dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Menurut hasil penelitian dalam persertifikatan massal di Kabupaten Pematang melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memenuhi asas pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah yaitu asas sederhana Asas aman, Asas terjangkau, Asas Mutakhir dan Asas terbuka. Dalam pelaksanaan program masih mengalami kendala pada jarak tempuh lokasi untuk dilakukan PTSL yang cukup jauh, terbatasnya juru ukur dan kurangnya antusias masyarakat karena ketidaktahuan program. Untuk meminimalisir penghambat maka perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat serta dilakukan pengecekan kembali oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pematang.

**Kata kunci : Prosedur, Asas, Faktor-Faktor**

## **ABSTRACT**

*The National Land Agency always strives to foster and develop activities for managing land administration, including the conceptual and integrated land registration. Pemalang Regency as one of the PTSL participants due to lack of public interest, low education level, so it needs assistance to legalize the status of land rights attached to it, namely through mass land certification in accordance with the principle of land registration.*

*This study aims to identify procedures for mass certification of state land as well as supporting and inhibiting factors that arise in the implementation of complete systematic land registration (PTSL) in Pemalang District. The method used in this study is an empirical juridical approach that is research in the field, starting with examining legal regulations which are then combined with data and behaviors that live in the midst of society.*

*According to the results of research in mass certification in Pemalang Regency through Complete Systematic Land Registration (PTSL) has fulfilled the principle of land registration in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National Land Agency No. 6 of 2018 concerning the implementation of land registration acceleration, namely the principle of simple Principles of safe Affordable principles, current principles and open principles. In the implementation of the program, there were still problems with the location distance to PTSL which was far enough, the limited number of surveyors and lack of enthusiasm of the community due to the ignorance of the program. In order to minimize the obstacles, further socialization is needed to the community and re-checking by the Pemalang Regency Land Agency.*

**Keywords : Procedures, Principles, Factors.**